

**ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71
TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN SULAWESI UTARA**

*ANALYZES THE REGIONAL FINANCIAL STATEMENTS PRESENTATION UNDER
GOVERNMENT REGULATION NUMBER 71 / 2010 ABOUT THE GOVERNMENT
ACCOUNTING STANDARD IN INDUSTRY AND COMMERCE DEPARTMENT OF
NORTH SULAWESI*

Juliana Mantiri¹, David Paul Elia Saerang², dan Inggriani Elim³

^{1 2 3}*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia
Email: ¹juliimantiri@yahoo.co.id*

ABSTRAK

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara adalah salah satu SKPD yang diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan daerah berdasarkan PP No. 71/2010. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyajian laporan keuangan Disperindag berdasarkan PP No. 71/2010. Metode Analisis yang digunakan adalah metode kualitatif, dimana data dikumpulkan dan dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen penyusunan laporan keuangan Disperindag Sulut tahun 2015 yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, sehingga penyajiannya telah sesuai berdasarkan PP No. 71/2010.

Kata kunci: SAP, PP No. 71/2010, Laporan Keuangan Daerah

ABSTRACT

Government Accounting Standard is the accounting principle applied in the preparation and presentation of financial statements in the context of government transparency and accountability. Department of Industry and Commerce of North Sulawesi is one SKPD required to present financial statements under PP 71/2010. The purpose of this study was to determine the financial statement presentation under PP 71/2010. The analysis method used is qualitative method, where data is collected and analyzed so that it can be deduced. The results showed that the components of the financial statements which Disperindag Sulut 2015 is Budget Realization Statement, Statement of Operations, Balance Sheet, Statement of Changes in Equity and Notes to Financial Statements, that the presentation has been appropriate under PP 71/2010.

Keywords: SAP, PP No. 71/2010, Regional Financial Report

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Era reformasi yang digulirkan membawa banyak perubahan, di bidang akuntansi pemerintahan terjadi perkembangan yang sangat signifikan dimana perkembangan akuntansi pemerintahan tersebut dapat dilihat dari era orde baru hingga era pasca-reformasi, sehingga perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan reformasi dibidang keuangan negara. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan reformasi akuntansi pemerintahan, dimana pemerintah mewajibkan penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan. Diterbitkannya PP No. 71/2010 tentang SAP yang menganut basis akrual (*accrual basis*), yang menggantikan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual menurut PP Nomor 24 Tahun 2005 tersebut akan dimulai pada tahun 2015. Ditetapkannya PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Dan hal ini berarti juga bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual. Komponen laporan keuangan PP No.71 tahun 2010 wajib dibuat untuk entitas pengguna anggaran yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), untuk entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum wajib pula menyajikan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSal) dan Laporan Arus Kas (LAK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diwajibkan membuat Laporan Keuangan yang berdasarkan PP 71/2010 sebagai bentuk pertanggung jawaban anggaran yang telah di realisasikan.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara bersama penyajian laporan keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara telah sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Tinjauan Pustaka Akuntansi

Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pengklasifikasian, penyajian secara sistematis dari transaksi-transaksi keuangan suatu badan usaha, serta penafsiran terhadap hasilnya (Priyati, 2013).

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan merupakan suatu proses sistematis pengelolaan keuangan pemerintah mulai dari bukti transaksi sampai ke proses pelaporan keuangan serta pertanggung jawaban kepada publik. Dalam PP No. 71 tahun 2010 dijelaskan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Laporan Realisasi Anggaran

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pokok pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Berbeda dengan PP No. 24 tahun 2005 tidak pernah membuat laporan keuangan Laporan Perubahan SAL. Laporan Perubahan SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca

Neraca dalam pemerintahan adalah merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan pemerintah pada tanggal tertentu. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Unsur yang dicakup oleh neraca pemerintahan terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas melalui kas umum negara/kas daerah selama periode tertentu. Pada dasarnya aktivitas keuangan pemerintah sebagian besar merupakan penerimaan dan pengeluaran kas negara/daerah dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran yang ditetapkan.

Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan dan oleh karenanya setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan. CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Landasan Empirik

Selvina Sitorus (2015) dengan judul Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon. Tujuan dari penelitian Untuk mengetahui proses persiapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon terhadap penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 yang akan diterapkan pada tahun 2015. Metode yang digunakan yaitu Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan DPPKBMD selaku pengelola keuangan daerah Kota Tomohon belum memiliki kesiapan dalam penerapan SAP

berbasis aktual, Selain itu peran DPPKBMD sebagai SKPKD masih memiliki hambatan yaitu penempatan SDM yang tidak tepat sesuai latar belakang pendidikan yang dimiliki.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian deskriptif. Metode deskriptif sebagai metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2014).

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang diteliti penulis bertempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara, dengan alamat Jln. Tololiu Supit. Teling, Manado. Waktu Penelitian dimulai pada bulan Mei tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus tahun 2016.

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Peneliti menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data bukan angka namun diangkakan (Sujarweni, 2015).

Sumber Data

Peneliti menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan obyek penelitian atau dapat dilakukan dengan menggunakan data dari Biro Pusat Statistik yaitu laporan keuangan disperindag tahun 2015.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha untuk melengkapi penulisan hasil penelitian ini, penulis memperoleh dan mengumpulkan data melalui observasi pengamatan dan terjun langsung ke objek yang diteliti, melakukan wawancara secara langsung dengan pihak yang mengerti dan menangani proses penyajian laporan keuangan, kemudian mengumpulkan data dan mempelajari dokumen, bukti-bukti atau catatan, arsip yang bersifat tulisan. Pengumpulan data dokumentasi menggunakan alat tulis manual maupun elektronik.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Sejarah singkat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara. Pada awalnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Utara masih dalam keadaan terpisah. Masih dinamakan Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan Propinsi Sulawesi Utara. Pada tanggal 8 juli 1985 terlaksana gedung kantor Departemen Perindustrian yang di resmikan secara langsung oleh Menteri Perindustrian Tuk Setyohadi. Gedung Kantor Dinas Perindustrian diresmikan pada tahun 1996, terjadilah penggabungan antara Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan Kemudian disatu namakan menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Drs. Piet Kaawoan. Tahun 2014 dipercayakan kepada Ir. Jenny Karouw, M.Si sebagai kepala disperindag sampai sekarang.

Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulawesi Utara terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan ini disertai lampiran-lampiran berbentuk daftar sebagai referensi terhadap pos-pos laporan keuangan utama maupun catatan atas laporan keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perhitungan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam satu tahun anggaran baik pada kelompok pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Laporan Realisasi Anggaran disajikan dengan klasifikasi pendapatan LRA menurut jenis pendapatan dan klasifikasi belanja menurut jenis belanja. Laporan Realisasi Anggaran Disperindag menyediakan informasi mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja. Belanja terbagi atas belanja operasi antara lain belanja pegawai dan belanja barang jasa, sedangkan belanja modal antara lain belanja modal dan serta belanja modal gedung dan bangunan.

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara

Uraian	Anggaran 2015 (Rp.)	Realisasi 2015 (Rp.)	(%)	Realisasi 2014 (Rp.)
Pendapatan – Lra	25.000.000,00	171.014.513,00	684,06	66.249.301,00
Pad - Lra	25.000.000,00	171.014.513,00	684,06	66.249.301,00
Pendapatan Retribusi Daerah – Lra	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pad Yang Sah – Lra	0,00	171.014.513,00	0,00	66.249.301,00
Belanja	18.221.611.020,00	16.567.961.615,00	90,92	18.119.788.115,00
Belanja Operasi	16.777.398.220,00	15.165.877.015,00	90,39	16.153.271.115,00
Belanja Pegawai	9.096.941.020,00	8.807.084.497,00	96,81	8.093.219.490,00
Belanja Barang Dan Jasa	7.680.457.200,00	6.358.792.536,00	82,79	8.060.051.625,00
Belanja Modal	1.444.212.800,00	1.402.084.479,00	97,08	1.966.517.000,00
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	974.212.800,00	937.474.600,00	96,23	1.421.417.000,00
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	470.000.000,00	464.610.000,00	98,85	545.100.000,00
Surplus / (Defisit)	(18.196.611.020,00)	(16.396.947.102,00)	90,11	(18.053.538.814,00)
Silpa / Sikpa	(18.196.611.020,00)	(16.396.947.102,00)	90,11	(18.053.538.814,00)

Sumber : Laporan Keuangan Disperindag Sulut, 2015

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2015. Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2015, neraca dalam PP No.71/2010 pengklasifikasian ekuitas tidak dibagi menjadi tiga bagian, akan tetapi digabungkan kedalam akun ekuitas, sama halnya dengan neraca Disperindag, pengklasifikasian ekuitas hanya terdapat satu akun yaitu ekuitas. Dalam hal ini untuk komponen neraca merupakan komponen laporan keuangan Disperindag yang pencatatannya menggunakan basis akrual (*accrual basis*) telah sesuai dengan PP No.71/2010.

Gambar 2. Neraca Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara

Uraian	2015 (dalam rupiah)	2014 (dalam rupiah)
Aset		
Aset Lancar		
Kas Di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas Di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas Di Blud	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	52.310.000,00	2.570.000,00
Jumlah Aset Lancar	52.310.000,00	2.570.000,00
Investasi Jangka Panjang		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi Dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi Dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
Aset Tetap		
Tanah	75.077.077.000,00	75.077.077.000,00
Peralatan dan Mesin	4.641.588.100,00	3.705.013.500,00
Gedung dan Bangunan	6.701.539.000,00	6.236.929.000,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	98.500.000,00	98.500.000,00
Aset Tetap Lainnya	17.300.000,00	17.300.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(2.298.817.598,00)	0,00
Jumlah Aset Tetap	84.237.186.502,00	85.134.819.500,00
Dana Cadangan		
Dana Cadangan	0,00	0,00
Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00
Aset Lainnya		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	548.846.200,00	620.578.200,00
Jumlah Aset Lainnya	548.846.200,00	620.578.200,00
Jumlah Aset	84.838.342.702,00	85.757.967.700,00
Kewajiban		
Kewajiban Jangka Pendek		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (Pfk)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00

Utang Beban	261.912.425,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	261.912.425,00	0,00
Kewajiban Jangka Panjang		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban	261.912.425,00	0,00
Ekuitas		
Ekuitas	84.576.430.277,00	85.757.967.700,00
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	84.838.342.702,00	85.757.967.700,00

Sumber : Laporan Keuangan Disperindag Sulut, 2015

Laporan Operasional

Penyajian Laporan operasional Disperindag pada tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015. Laporan Operasional (LO) Disperindag Sulut 2015 seharusnya disajikan komparatif dengan tahun 2014, akan tetapi tahun 2014 Disperindag masih mengikuti PP No. 24/2005 dan LO bukan merupakan komponen yang wajib disediakan oleh Disperindag, sehingga tidak bisa disajikan dengan tahun sebelumnya. Struktur Laporan Operasional Disperindag mencakup kegiatan operasional dan kegiatan non operasional, pos-pos yang terdapat dalam kegiatan operasional antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO, untuk pos beban didalamnya terdapat beban pegawai-LO, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, dan lain sebagainya. Untuk kegiatan non operasional antara lain Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang- LO, Surplus dari Kegiatan Non operasional Lainnya-LO dan lain sebagainya.

Tabel 3. Laporan Operasional Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara

No Urut	Uraian	Saldo 2015 (Rp.)
	Kegiatan Operasional	
8	Pendapatan – Lo	171.014.513,00
8.1	Pendapatan Asli Daerah (Pad) – Lo	171.014.513,00
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah – Lo	0,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah – Lo	0,00
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-Lo	0,00
8.1.4	Lain-Lain Pad Yang Sah – Lo	171.014.513,00
8.2	Pendapatan Transfer-Lo	0,00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lo	0,00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - Lo	0,00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - Lo	0,00
8.2.4	Bantuan Keuangan – Lo	0,00
8.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – Lo	0,00
8.3.1	Pendapatan Hibah – Lo	0,00
8.3.2	Dana Darurat – Lo	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya – Lo	0,00
9	Beban	16.268.829.234,00
9.1.1	Beban Pegawai – Lo	9.068.996.904,00
9.1.2	Beban Barang Dan Jasa	6.309.052.536,00
9.1.3	Beban Bunga	0,00
9.1.4	Beban Subsidi	0,00
9.1.5	Beban Hibah	0,00
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00
9.1.7	Beban Penyusutan Dan Amortisasi	890.779.794,00
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	0,00
9.1.9	Beban Lain-Lain	0,00
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00
9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00
9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	0,00
9.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00
9.2.6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00
	Surplus/Defisit Dari Operasi	(16.097.814.721,00)
	Kegiatan Non Operasional	
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar – Lo	0,00
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – Lo	0,00
8.4.3	Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – Lo	0,00

9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar – Lo	0,00
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – Lo	0,00
9.3.2	Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – Lo	0,00
	Surplus / Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	0,00
	Surplus / Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	(16.097.814.721,00)
9.3.3	Pos Luar Biasa	
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa – Lo	0,00
9.4.1	Beban Luar Biasa	0,00
	Surplus / Defisit Dari Pos Luar Biasa	0,00
	Surplus / Defisit – Lo	(16.097.814.721,00)

Sumber : Laporan Keuangan Disperindag Sulut, 2015

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional Disperindag pada tahun pelaporan 2015. Sama halnya dengan Laporan Operasional, Dalam PP No.71/2010 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan komponen laporan keuangan pokok, yang baru diberlakukan dan wajib disediakan oleh masing-masing SKPD selaku pengguna anggaran, berbeda dengan PP No. 24/2005 LPE bukan merupakan komponen laporan keuangan yang wajib disediakan oleh masing-masing SKPD. Penyajian laporan keuangan Disperindag tahun 2014 masih menggunakan PP No.24/2005, sehingga tidak ada perbandingan komparatif antara tahun 2015 dengan tahun (2014) sebelumnya. Untuk saldo ekuitas awal 2015 diambil dari rekening ekuitas (neraca) di tahun 2014.

Tabel 4. Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Sulawesi Utara

Uraian	2015 (Dalam Rupiah)
Ekuitas Awal	85.757.967.700,00
Surplus/Defisit-Lo	(16.097.814.721,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	
Koreksi Nilai Persediaan	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	(1.480.669.804,00)
Ekuitas Akhir	68.179.483.175,00

Sumber : Laporan Keuangan Disperindag Sulut, 2015

Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan CaLK Anggaran 2015 adalah memuat peranan pelaporan dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan, memuat ikhtisar realisasi pencapaian kinerja APBD menurut bidang, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi. Memuat informasi tentang organisasi yang ditetapkan sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, serta kesesuaian penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan. Memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan; pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbal sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual, dan terakhir memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan-kesimpulan penting tentang laporan keuangan yang telah dibuat oleh Disperindag.

Pembahasan

Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2015 disusun mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (PP 71 tahun 2010) dimana terdapat 5 komponen laporan keuangan pokok yang wajib disediakan oleh setiap SKPD diantaranya Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitasi (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Khusus Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan Laporan Arus Kas (LAK) hanya dibuat oleh unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Sedangkan untuk tahun 2014 komponen laporan keuangan pokok disediakan oleh Disperindag yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan CaLK yang masih berdasarkan pada PP No. 24/2005.

Basis Akuntansi

Laporan keuangan disperindag tahun anggaran 2015 dalam penyajiannya belum sepenuhnya mengikuti penyajian basis akrual murni (*Accrual Basis*) sesuai dengan Permendagri No. 64/2013 sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan PP No. 71/2010 mengenai kebijakan akuntansi berbasis akrual yang disusun oleh Kemendagri sebagaimana ditujukan untuk rekomendasi utama guna membantu Pemerintah Daerah menyusun kebijakan akuntansi yang berbasis akrual (murni). Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Disperindag tahun 2015 adalah kas menuju akrual (*Cash Toward Accrual*). Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk pengakuan pendapatan-LRA dan belanja, berbasis kas yang diatur dalam Permendagri No. 13/2006. Sedangkan pengakuan Neraca, LO, dan LPE berbasis akrual yang diatur dalam Permendagri 64/2013.

Basis akrual dalam LO untuk pengakuan Pendapatan-LO dan Beban, dalam Neraca yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, ekuitas dan untuk LO berarti bahwa pendapatan LO, beban diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan.

Basis akuntansi akrual sepenuhnya dalam hal ini pelaksanaannya tidaklah mudah, dibutuhkan kesiapan dari seluruh unit entitas akuntansi, unit entitas pelaporan, unit perbendaharaan dan unit pembuat standar akuntansi untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata dalam melaksanakan basis akrual sesuai dengan kewenangan dan peran masing-masing agar akuntansi berbasis akrual sepenuhnya dapat diterapkan dengan sebaik mungkin.

Komponen Laporan Keuangan

Dalam laporan operasional (LO) dan laporan perubahan ekuitas (LPE) Disperindag hanya menampilkan saldo untuk tahun 2015 hal ini dikarenakan tahun 2014 Disperindag belum memiliki LO dan LPE tersendiri. Dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas yang dibuat oleh Disperindag tahun 2015 hanya menampilkan kolom saldo tahun 2015, sehingga tidak ada perbandingan presentase kenaikan/penurunan antara tahun 2014 dengan tahun 2015. Dalam PP No. 71/2010 keterkaitan LRA dengan LO, rekening pendapatan dibedakan antara pendapatan-LRA dengan Pendapatan-LO demikian juga untuk belanja dibedakan antara rekening belanja dengan rekening beban. Dalam Laporan Realisasi Anggaran pengelompokan belanja tidak langsung dan belanja langsung dalam Permendagri 13/2006

ditiadakan dan diganti menjadi kelompok belanja operasi, belanja modal (sebelumnya masuk kelompok belanja langsung) dan belanja tak terduga (sebelumnya masuk kelompok belanja tidak langsung).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Komponen dari penyajian laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulawesi Utara adalah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas merupakan komponen laporan keuangan baru untuk tahun anggaran 2015, sehingga tidak ada perbandingan komparatif dengan tahun sebelumnya.
3. Laporan keuangan Disperindag memakai basis akuntansi *Cash Toward Accrual* dimana laporan realisasi anggaran berbasis kas, dan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan neraca berbasis akrual.
4. Penyajian laporan keuangan Disperindag telah sesuai berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 dan merupakan pertama kali menyajikan laporan keuangan berdasarkan PP No.71 tahun 2010.

Saran

1. Kiranya untuk tahun anggaran selanjutnya untuk menyajikan laporan keuangan berbasis akrual (*accrual basis*) sepenuhnya yang tercantum dalam Permendagri No. 64 tahun 2013.
2. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan kompeten dalam bidang laporan keuangan, sehingga mampu bekerja dengan baik dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara.
3. Selain itu untuk peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian pada beberapa dinas-dinas lain agar dapat menggambarkan secara umum dan luas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Paper dalam Jurnal

- [1] Sitorus, Selvina. 2015. "Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon. Jurnal EMBA Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal.941-949

Buku

- [2] Sugiyono. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*.Alfabeta. Bandung.
- [3] Sujarweni, Wiratna. V.2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press.Yogyakarta.
- [4] Sujarweni, Wiratna, V.2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta.
- [5] Sunyoto, Danang. 2016. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. PT. Refika Aditama. Bandung.